

Komunikasi Kebijakan Zonasi Pendidikan di Kota Makassar

Herman H, Andi Anugrah Mahyuddin

Ilmu Administrasi Publik PPs Universitas Negeri Makassar

e-mail: hermandody@unm.ac.id, aanugrah79@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengkaji komunikasi kebijakan zonasi pendidikan penerimaan peserta didik baru di kota Makassar, 2) Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan zonasi pendidikan penerimaan peserta didik baru di kota Makassar, 3) Untuk mendeskripsikan pola komunikasi massa dalam kebijakan zonasi pendidikan pada penerimaan peserta didik baru di kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) komunikasi kebijakan zonasi pendidikan penerimaan peserta didik baru di nilai terlaksana kurang efektif, 2) Implementasi kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dinilai kurang efektif, 3) Pola komunikasi massa dalam kebijakan zonasi pendidikan peserta didik baru di kota Makassar dinilai terlaksana dengan efektif. Secara keseluruhan dapat dipahami komunikasi kebijakan zonasi Pendidikan di Kota Makassar berjalan kurang efektif, hal ini tidak adanya sosialisasi secara massif.

Kata Kunci: *Komunikasi, Kebijakan, Zonasi Pendidikan*

1. PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Ditinjau dari proses, kebijakan publik diartikan sebagai hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang

mewakili sistem politik suatu negara. (Amiruddin Bakry, 2010).

Pada fenomena kebijakan khususnya di Indonesia seperti yang dinyatakan Trio Kurniawan (2018:1) Pendidikan di Indonesia tampaknya masih belum menjadikan manusia, pengalaman dan realitas sehari-hari sebagai basis pengetahuan. Perjalanan panjang pendidikan nasional pada kenyataannya memang masih menyisakan begitu banyak celah dan keterbatasan, apalagi ketika berhadapan dengan karakter pendidikan yang sejati/ideal.

“Bongkar-pasang” kebijakan pendidikan nasional (dalam hal ini kurikulum pendidikan nasional) tidak jarang memunculkan kebingungan di dalam pelaku pendidikan hingga pada aspek pedagogisnya.

Di tahun ajaran baru 2018 santer terdengar di berita cetak maupun online kehebohan terkait sistem zonasi pada penerimaan siswa baru. Mulai dari kekecewaan orang tua yang anaknya tidak diterima di sekolah unggulan, pengurusan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang tidak tepat penggunaannya dan juga tentang ramainya masyarakat mengurus surat keterangan domisili di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada klaim kebenaran Dalam *The Theory of Communicative Action*, Habermas (1987:378) yakni kesepakatan tentang dunia alamiah dan objektif terkait fenomena permasalahan diatas, kebijakan tersebut dinilai tidak objektif di dunia pendidikan saat ini, karena timbul opini masyarakat tentang ketidakadilan terhadap kebijakan zonasi pendidikan tersebut.

Berdasarkan fenomena kebijakan sistem zonasi pendidikan di Makassar penulis mengambil judul “Komunikasi Kebijakan Zonasi Pendidikan di Kota Makassar” untuk mengetahui komunikasi kebijakan sistem zonasi pendidikan di kota Makassar.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan membuat peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik

baru. kemudian peraturan tersebut dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Untuk mengkaji komunikasi kebijakan sistem zonasi PPDB maka dirumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Komunikasi Kebijakan Zonasi Pendidikan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Makassar?
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Zonasi Pendidikan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Makassar.
3. Bagaimana Pola Komunikasi Massa Dalam Komunikasi Zonasi Pendidikan Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Makassar ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Budi Winarno (2008:16) Secara umum istilah “kebijakan” atau “*Policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistimatis yang menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Adapun pengertian Kebijakan Publik menurut Thomas Dye (1981) dalam Subarsosno (2011:2) Apapun

pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencangkup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Prasetyo (2013:53). Bagi Habermas, kebijakan publik yang ideal adalah kebijakan yang bersifat deliberatif. Kebijakan deliberatif akan paling mungkin untuk digenerasikan dalam sistem politik yang disebut dengan demokrasi deliberatif. Ini adalah sistem politik kontemporer yang berusaha mengatasi kelemahan-kelemahan demokrasi agregatif konvensional yang bersifat prosedural. Demokrasi deliberatif sendiri bertumpu terutama kepada ruang publik yang aktif. Di dalam ruang publik ini, warganegara dapat berkumpul dan bertemu secara bebas untuk mendiskusikan isu-isu publik.

Ismail Nawawi (2009:131-132) Salah satu kajian tentang kebijakan publik terkait dengan implementasi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan. Dalam praktik implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks, sering bernuansa politis dan membuat adanya intervensi kepentingan. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan dikemukakan definisi sebagai berikut.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu penerapan kebijaksanaan terhadap suatu kebijakan terhadap pemerintah demi tercapainya tujuan yang bermasyarakat.

Menurut Jones (1996) dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

- a. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak;
- b. Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
- c. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Agusly Irawan Aritonang (2011:262) Salah satu perspektif yang dikenal dalam ilmu komunikasi yaitu perspektif kebijakan. Istilah perspektif digunakan oleh Ashadi Siregar (1998) untuk merujuk pada teori yang digunakan untuk keperluan analisis dalam suatu disiplin keilmuan dengan objek formal yang berbeda. Pendapat ini berangkat dari kenyataan bahwa

komunikasi bukanlah sebuah ilmu murni melainkan sebuah kajian yang perlu meminjam teori-teori dari bidang keilmuan lainnya.

Dalam *The Theory of Communicative Action*, Habermas (1987:378) menyatakan ada empat macam klaim, yakni:

- 1) klaim kebenaran (*truth*) yakni kesepakatan tentang dunia alamiah dan objektif
- 2) klaim ketepatan (*rightness*) yakni kesepakatan tentang norma-norma dalam dunia sosial
- 3) klaim autensitas atau kejujuran (*sincerity*) yakni kesepakatan tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang
- 4) klaim komprehensibilitas (*comprehensibility*) dicapai apabila kita telah mencapai kesepakatan klaim-klaim di atas. Setiap komunikasi yang efektif harus mencapai 'kompetensi komunikatif' tersebut.

Abdul Malik (2013:30-31) Formula Lasswell dianggap model komunikasi paling awal (1948). Lasswell menyatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : *Who says what in what channel to whom with what effect* (Siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa). Jawaban bagi pertanyaan paradigmatic Lasswell tersebut merupakan unsur-unsur proses komunikasi yaitu *communicator* (komunikator), *message* (pesan), *media* (media), *receiver* (komunikasi/penerima), dan *effect* (efek). Lasswell menggambarkannya seperti berikut:

Who?	Says what?	In what channel?	To Whom?	Whit what effect?
Communicator	Message	Channel	Receiver	Communicator
Control research	Content research	Medium		

Gambar: 2.1 Formula

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

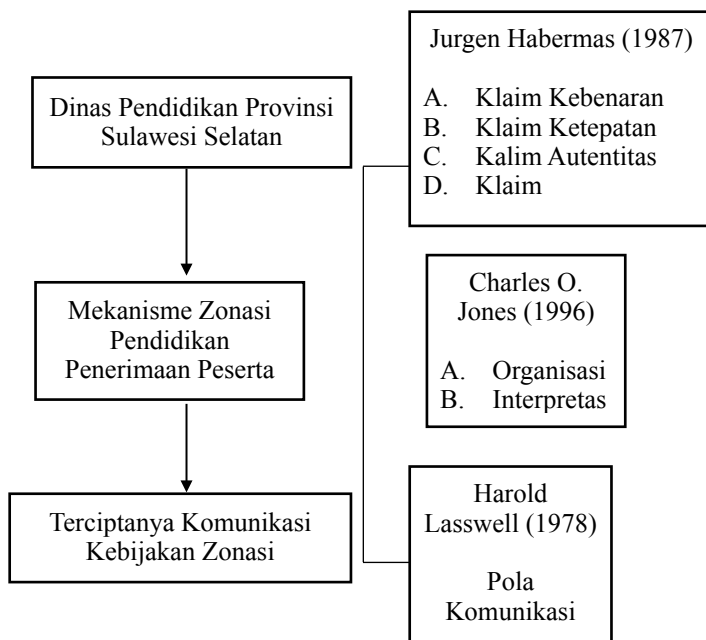
BAB III TATA CARA PPDB, Bagian Kesatu, Waktu dan Mekanisme PPDB, Pasal 3

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.

Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud, di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya

sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

3. KERANGKA KONSEPTUAL



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Denzin dan Licon (dalam Sugiyono 4: 2011) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif.

Adapun Lokasi penelitian ini yaitu di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar, SMAN 1 Makassar bertempat Jl. G. Bawakaraeng No.53, Gaddong, Kec. Bontoala, Kota Makassar, SMAN 17 Makassar bertempat di Jl. Sunu No.11, Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar, SMAN 21 Jl. Tamalanrea Raya No.1A, Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, penelitian lapangan yaitu mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Teknik ini sangat relevan digunakan dalam penelitian kelas yang meliputi pengamatan kondisi interaksi pembelajaran. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang

berdasarkan atas tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek- aspek yang terkait dengan kekerasan terhadap anak. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang kekerasan terhadap anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Tujuan dilakukannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wawancara dilakukan secara langsung dengan cara tatap muka dengan para informan secara terbuka dan santai sehingga informan dapat dengan leluasa dan bebas memberikan informasi yang dia ketahui mengenai implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang sistem perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam bentuk catatan dokumen yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang bisa berbentuk tulisan, gambar, kebijakan, dan foto-foto, serta catatan lapangan seperti peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Sistem Perlindungan Anak.

Miles and Huberman (Sugiyono, 2014: 246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Terdapat 3 komponen dalam menganalisis data, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salahsatu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kualifikasi data.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsistensi saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi Kebijakan Zonasi Pendidikan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Makassar

A. Klaim Kebenaran

Klaim Kebenaran berangkat dari tujuan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru. Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud, di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada klaim kebenaran yang merupakan tujuan dari sosialisasi kebijakan zonasi PPDB di Kota Makassar dianggap baik oleh pelaksana kebijakan walau beberapa dari masyarakat kurang sepakat pada kebijakan Zonasi Pendidikan karena hal tersebut mengganggu nilai prestasi dari peserta didik sehingga calon peserta didik tidak mampu untuk bersaing di sekolah negeri yang punya kualitas pendidikan baik. Pada kenyataan dari tujuan zonasi pendidikan di Makassar masyarakat menginginkan agar kuota jalur prestasi dan nilai dari kebijakan zonasi pendidikan perlu ditambah agar calon peserta didik punya peluang untuk bersaing pada jalur PPDB tersebut.

B. Klaim Ketetapan

Klaim Ketepatan berangkat pada kelayakan dari zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Makassar, beberapa pelaksana kebijakan menilai negatif tentang kelayakan zonasi PPDB di Kota Makassar. berikut contoh gambar zonasi dalam cakupan Sulawesi Selatan.

Pada kelayakan zonasi PPDB di Kota Makassar masih dianggap belum layak, karena Kota Makassar mempunyai populasi sangat tinggi dalam taraf PPDB SMAN karena beberapa daerah di kota Makassar terdapat sekolah yang masih kurang, misalnya Tamalanrea dan Tello hanya ada SMAN 21 dan SMAN 5. jadi masih perlu adanya pembangunan sekolah-sekolah di kota Makassar agar terjadi pemerataan zonasi pendidikan secara efektif.

Selain itu zonasi PPDB punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya karna peserta didik sudah tidak terlambat lagi ke sekolah dengan ditetapkannya zonasi, selain itu orang tua dari peserta didik mudah dipantau oleh orang tua nya, dan tidak terkena kemacetan lalu lintas. Negatifnya adalah potensi orang tua siswa bersikap manipulatif dalam hal administrasi. Hal tersebut sejalan dengan *The Theory Of Communicative Action* (1987) Kalau ada kesepakatan tentang pelaksanaan norma- norma dalam dunia sosial, berarti mencapai klaim ketepatan (*rightness*), yang berarti kesepakatan norma-norma dalam dunia sosial merupakan suatu bentuk kesepakatan pemerintah dengan masyarakat terkait regulasi maupun mekanisme dari zonasi pendidikan.

Pada klaim ketepatan Zonasi pendidikan di Kota Makassar khususnya SMA Negeri masih dianggap kurang layak, karena letak tiap SMA Negeri yang berada di Kota Makassar di beberapa tempat masih kurang sehingga populasi pendaftar peserta didik di beberapa area zonasi sekolah berlebih, misalnya SMAN 21 Makassar dan SMAN 5 Makassar yang berada di tello dan tamalanrea. Hal tersebut justru menjadi bahan pertimbangan terhadap kelayakan kebijakan zonasi pendidikan untuk diterapkan karena tidak melakukan perimbangan pupulasi terhadap sekolah negeri di Kota Makassar.

C. Klaim Kejujuran

Klaim Kejujuran berangkat pada anggapan dari pelaksana

kebijakan tentang sosialisasi zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Makassar. Beberapa anggapan dari pelaksana kebijakan menanggap tidak setuju dengan zonasi PPDB diterapkan walaupun punya tujuan yang baik.

Dewan Pendidikan (DP) Provinsi Sulawesi Selatan meminta Dinas Pendidikan Sulsel agar lebih masif menyosialisasikan penerapan sistem zonasi yang ditargetkan mencapai 90 persen untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019. “Kesalahpahaman di masyarakat harus ditekan dengan sosialisasi sistem zonasi yang lebih masif,” ungkap Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Dr H Adi Suryadi Culla di Makassar, Selasa (14/5).

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kata Adi, meski sistem zonasi telah direalisasikan dua tahun terakhir, namun faktanya masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan paham dengan aturan relatif masih baru ini. “Oleh karena itu, sosialisasi PPDB sitem zonasi perlu dilakukan ke bawah dan sebaiknya pihak sekolah ikut terlibat dalam sosialisasi sistem zonasi. Begitu pula dengan stakholder terkait, mulai dari organisasi termasuk dewan pendidikan,. Menurut Adi, kegagalan sebuah perencanaan tergantung dari sosialisasi awal yang dilakukan, menyampaikan landasan, maksud dan tujuan dari sebuah perencanaan. Begitu pula untuk sistem zonasi yang sepenuhnya akan berlaku di Sulawesi Selatan. “Jika ditelusuri, banyak masyarakat tidak paham apalagi

aturannya relatif masih baru, belum sepenuhnya masyarakat menerima. Ditambah kondisi psikologis, memang perlu diberikan penjelasan terkait tujuan pemerataan pendidikan yang dimaksud pemerintah. Dikutip dari Seruji.co.id

Sistem zonasi PPDB masih dianggap lemah di segi informasi teknologi dan dari segi kemampuan akademik peserta didik di SMAN 1 Makassar. selain daripada itu sosialisasi zonasi PPDB dianggap memiliki kelebihan dan kelemahan. Dikarenakan keterbatasan kuota PPDB yang ada pada tiap SMA Negeri sehingga beberapa dari masyarakat menginginkan agar kebijakan zonasi PPDB diterapkan berdasarkan nilai dari rapor dan bebas menentukan pilihan sekolah yang tersedia. Hal tersebut sejalan dengan *The Theory Of Communicative Action* (1987) Kalau ada kesepakatan tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang, berarti mencapai klaim autentisitas atau kejujuran (*sincerety*) yang berarti kesepakatan dunia batiniah dan terlepas dari bentuk mekanisme organisasi pada individu yaitu bentuk kejujuran yang objektif dari keterangan pelaksana kebijakan dalam memberikan informasi terkait zonasi pendidikan khususnya di Kota Makassar.

Pada klaim kejujuran dalam hal ini adalah keterangan objektif individu dari pelaksana kebijakan zonasi PPDB di Kota Makassar yang menganggap bahwa tujuan dari sosialisasi kebijakan zonasi PPDB ini baik walaupun beberapa masyarakat Kota Makassar

menganggap kebijakan zonasi pendidikan merupakan suatu kebijakan yang buruk. Dalam hal sosialisasi kebijakan zonasi PPDB di Kota Makassar dinilai masih belum tersosialisasi secara masif ke berbagai tempat, sehingga hal tersebut membuat masyarakat kaget dengan hadirnya kebijakan zonasi pendidikan tanpa adanya informasi dari pemerintah.

D. Klaim Komprehensibilitas

Klaim Komprehensibilitas berangkat dari pemahaman pelaksana kebijakan tentang ketentuan dari kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), adapun petunjuk teknis tertulis yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun prosedur sistem online aplikasi PPDB, peserta melakukan login pada website pendaftaran PPDB online 2019 (ppdbsulsel.epanrita.net) dengan menggunakan Nomor Ujian Nasional lebih dahulu. Kemudian peserta memilih jenjang sekolah SMA Negeri atau SMK Negeri yang diminati dan memilih jalur pendaftarannya, apakah jalur zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua yang dipilih. (sulselprov.go.id).

Sejalan daripada itu pelaksana Kebijakan zonasi PPDB melakukan sosialisasi zonasi PPDB berdasarkan petunjuk teknis yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kebijakan zonasi persisnya adalah kebijakan yang mutlak dan sekolah harus terima dan harus dilaksanakan ketika pelaksanaan ppdb sekolah tidak berhak untuk menolak misalnya kalo memang dia

masuk dalam zonasi dan masih ada daya tampung peserta didik itu harus tertampung di SMAN 1 Makassar. Hal tersebut sesuai dengan *The Theory Of Communicative Action* (1987) kalau mencapai kesepakatan atas klaim-klaim diatas secara keseluruhan berarti mencapai klaim komprehensibilitas (*comprehensibility*), hal tersebut merupakan ketika seluruh klaim diatas yaitu kalim kebenaran, klaim ketepatan, dan klaim autentitas tercapai yang dalam artian terikat dalam suatu analisis maka seluruhnya komperhensif satu sama lain atau dapat dikatakan sebagai komprehensibilitas.

Pada klaim komprehensibilitas dlaam hal ini yaitu Kebijakan zonasi PPDB di Kota Makassar diterapkan melalui sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat berdasarkan Petunjuk Teknis terkait PPDB yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut merupakan tugas mutlak dari para pelaksana kebijakan yang dituntun untuk melakukan tugas dengan cara mensosialisasikan zonasi PPDB di tiap daerah yang berada di Kota Makassar walapun kebijakan zonasi PPDB ini masih cukup lemah untuk diterapkan di Kota Makassar. Adapun kelemahan dari kebijakan zonasi PPDB yaitu kelemahan dari segi sistem informasi, para calon peserta didik sering mengalami gangguan akses secara online yang sehingga hal tersebut membuat mekanisme kebijakan zonasi pendidikan ini masih kurang matang sehingga kebijakan zonasi PPDB ini sulit diterima oleh

mayoritas masyarakat di Kota Makassar.

2. Implementasi Kebijakan Zonasi Pendidikan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Makassar

A. Organisasi

Pada organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan Ombudsman, Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, LSM, Inspektorat, Dewan Pendidikan, Forum Guru, PGRI, Cabang Dinas, dan Ketua MKKS dengan tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan zonasi PPDB. Kemudian kebijakan izonasi PPDB diturunkan ke Sekolah Negeri, Kemudian SMA Negeri meneruskan informasi Kebijakan Zonasi PPDB tersebut ke tingkat SMP sehingga calon peserta didik SMA Negeri mengetahui kebijakan Zonasi PPDB tersebut.

B. Interpretasi

Pelaksana kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menganggap bentuk penyampaian sosialisasi PPDB dilakukan dalam bentuk pertemuan misalkan seperti di Ombudsman, kita mendatangi secara langsung dan memaparkan petunjuk teknis zonasi PPDB. demikian juga di DPRD kita mengadakan pertemuan dam ketua MKKS cabang dinas. Adapun bentuk lain yaitu melalui media. Pendapat yang berbeda dari pihak sekolah bahwa Penyampaian sosialisasi PPDB dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang disediakan. Selain itu Bentuk penyampaian dilakukan secara tertulis dan melalui pertemuan diberbagai

pertemuan pertemuan forum forum pelatihan forum forum diskusi antar dinas pendidikan dengan pihak sekolah. Hal tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones, aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

Adapun interpretasi pada kebijakan zonasi pendidikan ini yaitu berupa bentuk pemahaman terhadap masyarakat yang berdasarkan petunjuk teknis yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Kepala Sekolah SMA Negeri meneruskan informasi tersebut ke masyarakat berdasarkan petunjuk teknis dengan memberikan pemahaman di berbagai area zonasi nya sehingga masyarakat mengetahui kebijakan zonasi PPDB.

C. Penerapan

Masyarakat menuntut bahwa didalam penerapan PPDB harus mentingkan nilai daripada jarak zonasi. Karena hal tersebut merupakan hasil usaha akademis peserta didik yang mengejar nilai tinggi untuk dapat masuk di SMAN yang mereka inginkan sehingga itu menjadi tuntutan dari masyarakat. Adapun kendala lain yaitu sistem PPDB yang pernah offline ketika telah diterapkannya zonasi PPDB, dimungkinkan hal tersebut terjadi karena ada pihak yang tidak setuju dengan sistem zonasi PPDB sehingga mereka melakukan peretasan

terhadap sistem zonasi PPDB karena pendaftaran PPDB sendiri berbasis online. Hal tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Di mana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

Pada penerapan Kebijakan zonasi PPDB masih dianggap kurang baik oleh beberapa masyarakat karena berdasarkan kuota dari jalur zonasi mempunyai angka 90% yang terbilang cukup banyak, sehingga hal tersebut mempersempit peluang jalur prestasi bagi para calon peserta didik. Selain itu masyarakat menuntut ingin jalur nilai rapor bagi calon peserta didik di masukkan dalam kuota jalur pendaftaran, sehingga calon peserta didik merasa puas dengan hasil akhir rapor masing-masing.

3. Pola Komunikasi Massa Zonasi Pendidikan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Makassar

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka akan dibahas pola komunikasi massa dalam zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Makassar, diketahui bahwa model komunikasi massa lasswell (1948) yaitu,

1. *Who? (Communicator)* : Pelaksana kebijakan dari zonasi PPDB, diantaranya;
 - a) Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Sleatan.
 - b) Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat SMAN 21 Makassar.
 - c) Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat SMAN 1 Makassar.
 - d) Kepala Sekolah SMAN 17 Makassar (*Control Research*).
2. *Says What? (Message)* : Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Makassar (*Content Research*).
3. *In what channel? (channel)*: Sosialisasi Secara Langsung, Media Pertelevisian, dan Media Informasi Online. (*Medium Research*)
4. *To whom? (Receiver)* : Masyarakat khususnya peserta didik sekolah menengah atas negeri. (*Audience Research*).
5. *With what effect? (Effect)* :Beberapa masyarakat merespon protes dengan melakukan aksi demonstrasi terhadap kebijakan zonasi PPDB di Kota Makassar, adapun yang menuntut perubahan persyaratan teknis kebijakan zonasi PPDB terkait kuota calon peserta didik (*Effect Research*).

Adapun pola komunikasi massa berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bila digambarkan dalam suatu pola komunikasi massa

Lasswell (1948) akan menyerupai seperti berikut:

Gambar: 4.6 Hasil Formula Lasswell

Who?	Says what?	In what channel?	To Whom?	With what effect?
Pelaksana kebijakan.	Kebijakan zonasi PPDB.	Sosialisai , Media.	Masyarakat	Tuntutan Perubahan PPDB.
Control research	Content research	Medium research	Audience research	Effect research

Hasil dari model komunikasi massa tersebut sejalan dengan model pola komunikasi massa Lasswell (1948) bahwa cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : *Who says what in what channel to whom with what effect* (Siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa). Jawaban bagi pertanyaan paradigmatik Lasswell tersebut merupakan unsur-unsur proses komunikasi yaitu *communicator* (komunikator), *message* (pesan), *media* (media), *receiver* (komunikas/penerima), dan *effect* (efek) Abdul Malik (2013:30-31)

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan tentang Komunikasi Kebijakan Zonasi Pendidikan di Kota Makassar dengan fokus pada komunikasi zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Makassar, implementasi kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Makassar, dan model komunikasi massa.

1. Tindakan komunikasi didalam sosialisasi maupun melalui media yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dinilai belum maksimal berjalan sebab beberapa dari masyarakat di Kota Makassar menganggap hal tersebut diterapkan secara tiba-tiba tanpa adanya sosialisasi zonasi secara masif walaupun beberapa dari masyarakat setuju dengan diterapkannya zonasi PPDB di Kota Makassar.
2. Pada implementasi zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Makassar dinilai belum efektif, karena pada penerapannya terdapat beberapa kendala teknis yang secara online terganggu, selain itu kuota dari zonasi PPDB 90% dianggap terlalu berlebihan sehingga mempersempit jalur prestasi dan meniadakan keunggulan nilai peserta didik.
3. Pola komunikasi massa yang dilakukan dalam mengkomunikasikan kebijakan zonasi pendidikan peserta didik baru di kota Makassar dapat dilihat dengan menggunakan pola komunikasi massa Lasswell (1948) yaitu berdasarkan indikator komunikasi pada model pola komunikasi massa. Sehingga menunjukkan bahwa yang melakukan komunikasi dalam mensosialisasikan zonasi penerimaan peserta didik baru di Kota Makassar adalah Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi

Sleatan, Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat SMAN 21 Makassar dan SMAN 1 Makassar. dan Kepala Sekolah SMAN 17 Makassar yang menyampaikan tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sosialisasi secara langsung, media pertelevisian dan media informasi online ke masyarakat kota Makassar sehingga menimbulkan dampak kepada masyarakat dengan menuntut perubahan persyaratan teknis kebijakan zonasi PPDB terkait kuota calon peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar–Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bakry, Amiruddin. 2010, *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Jurnal Medtek. Volume II. Universitas Negeri Makassar.
- Habermas, Jürgen. 1987 *The Theory of Communicative Action*, Jilid II, Boston: Beacon Press.
- Irawan, Aritonang, Agusly. 2011. *Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jurnal Komunikasi Vol. 1 Nomor 3. Yogyakarta. Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada.
- Kuriniawan, Trio. 2018. *Filsafat Pendidikan Demokratis-Deliberatif Dari Jürgen-Habermas untuk Pendidikan*

- Indonesia*. Malang. Literasi Nusantara.
- Malik, Abdul. 2013. *Komunikasi Massa*. Makassar. Alauddin University Press
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*, Surabaya. Putra Media Nusantara.
- Prasetyo, Antonius, Galih 2013. *Jurgen Habermas dan Analisis Kebijakan Kritis. Jurnal Politik dan Manajemen Publik*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta. PT Buku Kita.